

BAB V

PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN

A. UMUM

Krisis ekonomi berkepanjangan yang berlanjut dengan reformasi di bidang politik dan hukum telah melahirkan perubahan cepat pada tatanan kehidupan dan perilaku masyarakat perkotaan. Di satu pihak, dampak positif dari perubahan ini adalah terjadinya transformasi dari masyarakat yang terkungkung dan tak berdaya menjadi masyarakat yang lebih berani bersuara dan memperoleh kebebasan dalam berdemokrasi, dengan harapan terciptanya struktur masyarakat yang lebih dinamis dan partisipatif (madani). Namun di lain pihak, dampak negatif yang ditimbulkan adalah terjadinya kebebasan tak terkendali dan pengabaian hukum pada sebagian masyarakat kota yang justru menakutkan masyarakat lainnya serta menyurutkan demokrasi itu sendiri.

Dinamika politik nasional dalam lima tahun terakhir diharapkan dapat menjadi proses pembelajaran (*learning process*) bagi kehidupan masyarakat terutama dalam berperilaku politik dan berdemokrasi serta dalam menyikapi positif kebebasan yang diperolehnya. Dengan demikian ke depan dapat terwujud masyarakat yang diharapkan mampu mendorong peran serta positif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dalam kaitan perubahan dan proses reformasi di atas, peranan dan eksistensi aparatur daerah sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah juga dituntut untuk mampu memahami kondisi objektif lingkungan masyarakatnya. Aparatur daerah diharapkan mampu mewujudkan harapan masyarakat akan terjadinya perubahan pada pelayanan publik yang lebih adil, netral, profesional, efisien, efektif, produktif, transparan serta bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk itu, diperlukan perubahan total pada sikap, perilaku, tindakan ke arah budaya kerja yang efektif dan efisien, berdisiplin tinggi, hemat dan bersahaja serta anti KKN. Dalam jangka menengah diharapkan akan terwujud aparatur daerah yang

dapat menjadi panutan, teladan dan berwibawa serta dalam waktu bersamaan bukan menjadi aparatur yang ditakuti oleh lingkungan masyarakatnya.

Selain itu dalam kaitan dengan kegiatan penerangan, komunikasi dan media masa, hendaknya lebih diarahkan pada penyebaran informasi yang lebih merata, sehingga dengan adanya informasi yang akurat dan berkualitas, maka kebijakan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta berdampak positif terhadap partisipasi warga masyarakat dalam menunjang pembangunan di Propinsi DKI Jakarta. Untuk itu penguatan fungsi *Public Relation (PR)* dari Humas Pemerintah Propinsi DKI Jakarta harus dapat memberikan informasi aktual yang baik dan benar, serta mengembangkan jaringan kerja (*networking*) dengan lembaga lainnya termasuk insan pers dan tetap memegang teguh kode etik jurnalistik.

B. ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya merealisasikan paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang berorientasi pada kepentingan publik, maka arah dan kebijakan pemerintahan daerah harus mampu melakukan perubahan mendasar yang berorientasi pada perubahan dan perkembangan lingkungan masyarakatnya.

Arah kebijakan dari setiap fungsi pemerintahan meliputi:

1. Pemerintahan Umum

Menciptakan sistem dan fungsi pemerintahan untuk setiap wilayah yang efektif dan efisien terutama dalam rangka pengembangan otonomi daerah dengan merumuskan kebijakan dan kewenangan wilayah administrasi kotamadya/kabupaten yang bermanfaat dalam mewujudkan pengembangan dan pemberdayaan pemerintahan wilayah serta menata kembali peraturan dan administrasi pertanahan.

2. Aparatur

Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme pegawai yang bebas KKN, pro-aktif, serta mampu mengelola kekayaan daerah secara transparan dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

3. Perencanaan dan Pengawasan

Menyusun perencanaan pembangunan daerah yang transparan dan mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan masyarakat sehingga fungsi kontrol dan proses pengawasan baik pengawasan internal maupun pengawasan yang dilakukan masyarakat akan lebih mudah dan efektif.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatkan penerimaan daerah dengan lebih mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan dengan meningkatkan peranserta masyarakat dan sektor swasta serta pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah yang lebih efisien dan efektif dengan berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas publik.

5. Sistem Informasi

Menciptakan sistem teknologi informasi dan statistik yang dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat sebagai basis pembangunan daerah, serta meningkatkan profesionalisme dalam perstatistikan dan teknologi informasi.

C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Sebagai tindak lanjut dari arah dan kebijakan pembangunan Propinsi DKI Jakarta bidang pemerintahan, maka disusun program-program daerah yang dikelompokkan dalam lima kelompok, yaitu pemerintahan umum, aparatur, perencanaan dan pengawasan, pengelolaan keuangan daerah, serta sistem informasi.

1. Pemerintahan Umum

1.1. Program Pengembangan Otonomi Daerah

Tujuan program ini adalah meningkatkan profesionalisme, kemampuan manajemen aparat pemerintah Propinsi DKI Jakarta serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah yang menyangkut mekanisme kerja, struktur organisasi dan peraturan perundang-undangan guna mendukung penyelenggaraan otonomi

daerah. Disamping itu, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam memahami prinsip-prinsip demokrasi, reformasi dan supremasi hukum dalam menjamin pelaksanaan otonomi daerah.

Sasaran program ini adalah terciptanya struktur organisasi yang tepat, kinerja kelembagaan yang tinggi serta pemerintahan yang bersih. Selain itu diharapkan juga dengan adanya program ini semakin meningkatnya pemahaman penyelenggaraan pemerintah daerah tentang prinsip demokrasi, reformasi dan supremasi hukum.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) melaksanakan tugas kelembagaan, (2) melakukan analisis kebutuhan peningkatan sumberdaya manusia aparatur daerah, (3) melakukan pengkajian tentang otonomi daerah, (4) penataan struktur organisasi dan manajemen pemerintahan daerah yang baik, (5) mengembangkan hubungan kerja antar organisasi di lingkungan pemerintahan daerah dan antara pemerintah dan masyarakat, serta (6) menyediakan sarana prasarana operasional lembaga legislatif.

1.2. Program Pengembangan Pemerintahan Tingkat Propinsi

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Propinsi DKI Jakarta dan mengembangkan sistim pemerintahan terutama dalam pelayanan publik, yang disesuaikan dengan keinginan dan dinamika kehidupan masyarakat.

Sasaran program ini adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi Propinsi DKI Jakarta dan terumuskannya kebijakan pada tingkat propinsi terutama yang berhubungan dengan pelayanan dan sarana prasarana publik.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) merumuskan kebijakan daerah tingkat propinsi, (2) mengoptimalkan kegiatan administrasi sekretariat daerah tingkat propinsi, dan (3) meningkatkan sarana prasarana pelayanan publik.

1.3. Program Pengembangan Pemerintahan Tingkat Kotamadya

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas dan pemberdayaan aparatur, mengembangkan dan mengoptimalkan kegiatan administrasi tingkat kotamadya serta meningkatkan pelayanan publik.

Sasaran program ini adalah tertatanya administrasi tingkat kotamadya dengan lebih tertib serta meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) mengimplementasikan kebijakan, (2) meningkatkan penataan dan penertiban administrasi wilayah, dan (3) meningkatkan sarana prasarana pelayanan tingkat kecamatan dan kelurahan.

1.4. Program Pengembangan Pemerintahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Tujuan program ini adalah meningkatkan potensi, mengembangkan dan mengoptimalkan kegiatan administrasi serta meningkatkan sarana prasarana pelayanan publik dan aparat, melengkapi struktur organisasi pemerintahan serta meningkatkan kualitas dan pemberdayaan aparatur.

Sasaran program ini adalah tertatanya administrasi Kabupaten Kepulauan Seribu dengan lebih tertib serta meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) mengimplementasikan kebijakan, (2) meningkatkan penataan organisasi dan tertib administrasi, (3) meningkatkan kualitas SDM aparatur, dan (4) melengkapi sarana prasarana pelayanan publik dan aparat pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

1.5. Program Penataan Administrasi Pertanahan

Program ini bertujuan untuk menata kembali administrasi pertanahan, sesuai aturan yang berlaku mengenai pertanahan, menata kepemilikan lahan termasuk milik pemerintah daerah.

Sasaran program yang ingin dicapai adalah tersusunnya sistem administrasi pertanahan yang tertib dan baik, serta meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan publik.

Kegiatan pokok yang dilakukan pada program ini adalah: (1) menyusun administrasi pertanahan secara lengkap, (2) menyediakan peta dasar untuk keperluan pembangunan, (3) meneliti, menyusun kembali dan mendokumentasikan bukti-bukti legal kepemilikan lahan, (4) membuat sertifikat kepemilikan lahan untuk seluruh lahan milik pemerintah daerah, (5) melakukan konsolidasi pertanahan lahan milik pemerintah daerah, (6) menangani masalah yang berkaitan dengan sengketa dan penguasaan lahan secara tidak sah, (7) mendokumentasikan bukti-bukti kepemilikan lahan, serta (8) mengatur dan mengadministrasikan kepemilikan lahan.

2. Aparatur

2.1. Program Pengembangan SDM Aparatur

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan peran SDM aparatur Pemda Propinsi DKI Jakarta terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik dan profesional.

Sasaran program ini adalah berfungsinya seluruh SDM aparatur pemda secara produktif dan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) mengoptimalkan fungsi seluruh aparat agar tidak terjadi stagnasi arus pekerjaan, (2) rasionalisasi jumlah pegawai sesuai kebutuhan, (3) melakukan evaluasi kinerja aparatur secara periodik, (4) melakukan standarisasi tolok ukur kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.2. Program Peningkatan Administrasi Kepegawaian

Tujuan program ini adalah menciptakan suatu sistem administrasi, pembinaan dan pengembangan kepegawaian yang lebih efektif dan efisien.

Sasaran program ini adalah: (1) tersusunnya mekanisme administrasi kepegawaian yang lebih baik, dan (2) terciptanya tertib administrasi kepegawaian.

Kegiatan pokok yang dilakukan pada program ini adalah: (1) menyusun dan menertibkan database administrasi kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi informasi dari tingkat kelurahan sampai propinsi, serta (2) membatasi dan mengontrol penerimaan pegawai baru, (3) merumuskan sistem penilaian kinerja pegawai dan sistem pembinaan serta pengembangan kualitas karir pegawai yang obyektif dan transparan, serta (4) membina dan mengembangkan sistem pengembangan karir.

2.3. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas, kemampuan, dan keterampilan aparatur pemerintah Propinsi DKI Jakarta sehingga dapat lebih mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan profesional terutama dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Sasaran program ini adalah terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di Propinsi DKI Jakarta.

Kegiatan pokok yang dilakukan pada program ini adalah: (1) menyempurnakan sistem pendidikan dan pelatihan administratif sesuai kebutuhan organisasi, (2) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis bagi peningkatan kemampuan aparatur, (3) memberi kesempatan kepada pegawai yang potensial untuk mengikuti pendidikan penjenjangan, serta (4) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Pendidikan dan Pelatihan.

2.4. Program Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan

Tujuan program ini adalah mengoptimalkan fungsi kelembagaan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan birokrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menutup peluang melakukan KKN.

Sasaran program ini adalah tersusunnya struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, serta tersusunnya sistem ketatalaksanaan yang baik sesuai dengan kewenangan organisasi.

Kegiatan pokok yang dilakukan pada program ini adalah : (1) mengoptimalkan struktur organisasi kelembagaan pemerintah daerah agar lebih efektif dan efisien, (2) menyempurnakan tugas pokok dan fungsi struktur aparatur daerah, serta (3) mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggara pemerintahan.

3. Perencanaan dan Pengawasan

3.1. Program Pengembangan Perencanaan dan Pengendalian Rencana

Tujuan program ini adalah untuk merumuskan dan mensinkronkan pemikiran masyarakat melalui proses *bottom up* dengan gagasan yang bersifat *top down* kedalam suatu perencanaan strategis. Dengan demikian, rumusan perencanaan daerah secara nyata sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas dan menjangkau kebutuhan pembangunan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran program ini adalah tersusunnya perencanaan daerah yang mampu menampung hasil pemikiran dan aspirasi masyarakat, serta mempunyai nilai strategis dilihat dari relevansi dan manfaatnya. Dengan pengkajian dan analisis perencanaan yang baik dan akurat diharapkan tingkat implementasinya di lapangan akan berjalan dengan baik, dan mempunyai dampak yang nyata kepada masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilakukan pada program ini adalah: (1) meningkatkan pengkajian dan analisis perencanaan yang lebih akurat, (2) menyusun perencanaan daerah yang partisipatif, serta (3)

melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan sebagai *feedback* bagi perencanaan pembangunan daerah selanjutnya.

3.2. Program Penelitian dan Pengembangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan hasil penelitian untuk referensi pengambilan keputusan dan mengantisipasi kebutuhan dalam pengembangan pembangunan Propinsi DKI Jakarta di masa depan. Pengembangan kerjasama dengan instansi pusat dan asistensi teknis dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan di Propinsi DKI Jakarta.

Sasaran program ini adalah meningkatnya jumlah dan jenis penelitian dan pengembangan serta termanfaatkannya hasil penelitian yang telah dilakukan, terutama penelitian yang berkaitan dengan pembangunan dan penyelesaian masalah. Menghindarkan terjadinya kegiatan penelitian dan pengembangan yang kurang bermanfaat, mengkoordinasikan berbagai kegiatan penelitian lintas unit kerja, sehingga dapat dihindarkan inefisiensi penggunaan anggaran.

Kegiatan pokok yang dilakukan pada program ini adalah: (1) meningkatkan kualitas kegiatan dan hasil penelitian dan pengembangan, (2) menyusun dan mendokumentasikan hasil penelitian untuk memudahkan pencarian referensi dan penelitian pengembangan lanjutan, serta (3) mengurangi terjadinya duplikasi penelitian dan pengembangan.

3.3. Program Peningkatan Pengawasan Fungsional

Tujuan program ini adalah untuk memberdayakan seluruh unsur pengawasan fungsional dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Propinsi DKI Jakarta. Fungsi pengawasan (*controlling*) bertujuan untuk meluruskan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk itu profesionalisme para pelaku pengawasan perlu ditingkatkan seiring

dengan makin meningkatnya aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Sasaran program ini adalah terselesaikannya kasus-kasus KKN sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan berkurangnya kejadian penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

Kegiatan pokok yang dilakukan pada program ini adalah: (1) mengembangkan sistem pengawasan yang lebih efektif dan transparan, (2) meningkatkan kualitas informasi sistem pengawasan, (3) menegakkan etika dan moral di lingkungan aparat audit internal pemerintah daerah, (4) menindaklanjuti hasil pengawasan, dan (5) menyediakan media untuk menampung aspirasi, pengaduan, dan laporan masyarakat terhadap penyimpangan perilaku dan kinerja aparatur daerah.

3.4. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

Tujuan program ini adalah untuk menjalin dan meningkatkan hubungan ekonomi, sosial dan budaya antara Pemda Propinsi DKI Jakarta dengan pemerintah daerah lainnya dalam dan luar negeri yang saling menguntungkan. Khusus kerjasama dengan kota di luar negeri (*sister city*) didasarkan pada semangat saling menghargai dan saling membantu tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik yang mungkin berbeda pada masing-masing negara.

Sasaran program ini adalah terjalinnya hubungan dan kerjasama yang harmonis antar daerah di dalam negeri dan luar negeri, untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat tentang pengalaman pembangunan di berbagai bidang, yang mungkin dapat diterapkan di Propinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilakukan pada program ini adalah : (1) menyusun rumusan tentang pengembangan kemitraan dan kerjasama antar kota dan daerah dalam dan luar negeri, (2) melakukan studi banding tentang pengalaman pembangunan dan pengelolaan kota

terutama pada kota-kota yang telah maju, (3) menindaklanjuti hasil pengembangan kerjasama, serta (4) mengantisipasi peluang pengembangan kerjasama.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah

4.1. Program Perbendaharaan Daerah

Program ini bertujuan untuk mendapatkan suatu sistem dan pola penataan perbendaharaan daerah yang baik dan dapat menjawab tantangan perkembangan aktivitas keuangan di masa mendatang, seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di Propinsi DKI Jakarta.

Sasaran program ini adalah tersedianya perbendaharaan daerah yang dapat memenuhi kepentingan berbagai pihak, sehingga tidak terjadi lagi keluhan terhadap kinerja perbendaharaan daerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan pada program ini adalah: (1) memberikan pelatihan keterampilan kepada para pengelola keuangan, (2) membina dan mengembangkan sistem administrasi perbendaharaan daerah yang lebih baik, transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan teknologi informasi.

4.2. Program Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penataan pengelolaan administrasi keuangan daerah dalam menghadapi aktivitas ekonomi yang makin luas dan kompleks, seiring dengan kemajuan perkembangan pembangunan.

Sasaran program ini adalah terwujudnya sistem pengelolaan administrasi keuangan daerah yang seluruh aktivitasnya makin tertib dan transparan, dengan memanfaatkan teknologi mutakhir.

Kegiatan pokok yang dilakukan pada program ini adalah: (1) meningkatkan kualitas penyajian data penerimaan dan pengeluaran daerah, (2) menata kembali sistem administrasi keuangan daerah

agar lebih transparan dan efektif, serta (3) melakukan komputerisasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

4.3. Program Peningkatan Penerimaan Daerah

Pajak dan retribusi merupakan komponen utama dari sumber pendapatan daerah. Perkembangan penerimaan pajak dan retribusi seyogyanya seiring dengan perkembangan ekonomi yang setiap tahun menunjukkan trend meningkat. Kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi penerimaan pajak dan retribusi, disamping upaya pemerintah daerah sendiri untuk mengefektifkan pemungutannya.

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi dari semua objek pajak di wilayah Propinsi DKI Jakarta. Pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi akan sangat berpengaruh sebagai sumber dana pembangunan daerah. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi secara periodik terhadap penetapan target penerimaan pajak dan retribusi setiap tahunnya.

Sasaran program ini adalah tersusunnya suatu sistem dan pola penerimaan pajak dan retribusi yang modern, efektif dan efisien sehingga mampu mengoptimalkan penerimaan daerah, sejalan dengan tantangan kebutuhan pembangunan yang makin berkembang.

Kegiatan pokok yang dilakukan pada program ini adalah: (1) melakukan perencanaan, perkiraan dan evaluasi terhadap setiap objek pajak dari sisi target dan realisasinya, (2) memanfaatkan teknologi mutakhir (*online system*) dalam proses pemungutannya, (3) memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui berbagai media tentang pajak, serta (4) memberikan pembinaan dan pelatihan pada petugas pajak dan petugas retribusi.

4.4. Program Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Aset Daerah

Tujuan program ini adalah melakukan pengembangan dalam bidang administrasi pengelolaan aset daerah, dan melindungi

kepemilikan pemerintah daerah. Dengan demikian dapat dilakukan melalui optimalisasi pemberdayaan aset daerah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kehilangan.

Sasaran program ini adalah terlaksananya sistem administrasi pengelolaan aset daerah yang tertib dan dinamis serta mampu mengantisipasi perkembangan keadministrasian pemerintah daerah baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang.

Kegiatan pokok yang dilakukan pada program ini adalah: (1) menyusun peraturan perundangan berkaitan dengan pencatatan, pendayagunaan dan pengamanan aset pemerintah daerah, (2) menata dan menyusun kembali administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah agar lebih tertib dan dinamis, (3) melakukan komputersasi dalam bidang administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah, (4) melakukan pencatatan, pendayagunaan dan pengamanan aset pemerintah daerah, dan (5) melakukan sertifikasi aset pemerintah daerah.

5. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam penyediaan data dan informasi bagi masyarakat. Sistem informasi dan statistik yang handal dibutuhkan pula untuk mendukung kelancaran proses perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang makin luas dan kompleks. Untuk keperluan ini ada dua program pemerintah daerah, yaitu: pengembangan statistik daerah, dan pengembangan sistem data elektronik.

5.1. Program Pengembangan Statistik Daerah

Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan penyediaan data statistik untuk seluruh aspek sosial dan ekonomi, serta optimalisasi pemanfaatannya bagi kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat luas.

Sasaran program ini adalah terpenuhinya kebutuhan data pembangunan yang aktual, akurat dan tepat waktu, bagi kepentingan pemerintah daerah serta masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan data sosial-ekonomi untuk memenuhi kebutuhan umum melalui kegiatan penelitian, survei ataupun sensus, (2) mengembangkan kompilasi data administrasi (*administrative record*) bekerjasama dengan kantor wilayah ataupun dinas-dinas terkait, (3) melakukan pembinaan aparat Pemda tentang pentingnya arti statistik dan peranan strategisnya bagi penetapan kebijakan dan informasi publik, (4) mendukung penyediaan data bagi penyusunan berbagai laporan hasil pembangunan, dan (5) mengembangkan penggunaan teknologi informasi untuk penyelenggaraan statistik.

5.2. Program Pengembangan Teknologi Informasi

Tujuan program ini adalah untuk mewujudkan suatu sistem teknologi informasi yang mendukung kemudahan dan kelancaran administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kemudahan masyarakat mengakses berbagai informasi yang dimiliki pemerintah daerah.

Sasaran program ini adalah terwujudnya sistem jaringan informasi yang lengkap dan handal bagi kepentingan internal pemerintah daerah maupun masyarakat luas.

Kegiatan pokok program ini adalah: (1) mengembangkan sistem *database* untuk berbagai keperluan, (2) mengembangkan *warehouse* data, (3) mengembangkan sistem jaringan data elektronik antar unit kerja di lingkungan Pemda maupun antara Pemda Propinsi DKI Jakarta dengan instansi lainnya, dan (4) mengembangkan sistem penyajian data yang dinamis dan mudah diakses oleh masyarakat umum (*user friendly*).

5.3. Program Peningkatan Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi

Tujuan program ini adalah untuk mendapatkan suatu sistem pengelolaan kearsipan dan dokumentasi yang rapi, serta memudahkan pencarian kembali arsip dan dokumen yang diperlukan.

Sasaran program ini adalah terciptanya sistem pengelolaan arsip dan dokumentasi yang mampu menjawab keperluan penyempurnaan dalam masalah kearsipan dan dokumentasi secara cepat dan tepat.

Kegiatan pokok yang dilakukan pada program ini adalah: (1) menyusun sistem pengelolaan kearsipan dan dokumentasi pemerintahan daerah yang baik dan rapi, (2) melakukan komputerisasi berjenjang mulai dari tingkat kelurahan dalam pengelolaan arsip dan dokumentasi, serta (3) mengadakan pelatihan pengelolaan arsip pada setiap tingkat yang dibutuhkan.

5.4. Program Pengembangan Kehumasan dan Keprotokolan

Sistem kehumasan dan keprotokolan merupakan salah satu mata rantai dari keberadaan suatu organisasi, baik organisasi pemerintah ataupun swasta. Makin teratur kegiatan kehumasan dan keprotokolan dalam suatu pemerintahan menunjukkan adanya komunikasi yang baik antara lembaga pemerintahan tersebut dengan lingkungannya. Dirasakan makin perlu adanya media elektronik yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang aktivitas dan dinamika daerah.

Tujuan program ini adalah menciptakan sistem kehumasan dan keprotokolan, yang lebih baik, modern dan luas, sehingga masyarakat tidak mendapatkan kesulitan untuk memperoleh hak publiknya dalam mengetahui segala sesuatu berkaitan dengan pemerintahan daerahnya. Dan disisi lain, menempatkan Humas sebagai *Public Relation (PR)* bagi Pemerintah Daerah untuk membangun citra yang baik.

Sasaran program ini adalah terciptanya sistem kehumasan dan keprotokol agar semua pihak mudah untuk mendapatkan informasi langsung mengenai segala sesuatu berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.

Kegiatan pokok yang dilakukan pada program ini adalah: membuat dan menyusun suatu sistem kehumasan dan keprotokolan yang lebih baik, modern, dan luas, dimana segala informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, dengan aturan yang telah ditetapkan.

5.5. Program Pemetaan dan Informasi Pertanahan

Tujuan program ini adalah menyusun dan mengembangkan peta kota dan sistem informasi pertanahan yang akurat, transparan dan dinamis bagi kebutuhan masyarakat, pembangunan dan investasi dalam memperoleh peta dasar kota.

Sasaran program ini adalah tersedianya informasi yang akurat mengenai peta kota Jakarta dan sistem informasi pertanahan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) membangun sistem informasi pertanahan yang akurat dan transparan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi tata ruang kota, (2) mengembangkan sistem informasi pertanahan yang mampu meningkatkan peran masyarakat untuk memanfaatkannya sebagai tuntutan kegiatan pembangunan, serta (3) menyempurnakan peta dasar kota dalam sistem global yang menjadi kebutuhan semua pihak dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pengendalian pembangunan serta kegiatan yang menunjang di bidang pertanahan perkotaan.